

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

Pertama, Jakarta telah menjadi kota harapan bagi sekitar tiga juta orang di tahun 1960. Kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang pesat di masa itu. Adanya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, kemiskinan di desa-desa pedalaman Jawa, dan tingginya tingkat kelahiran merupakan beberapa hal yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Semarak pembangunan di Jakarta karena adanya proyek mercusuar Soekarno ikut mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota. Suatu gejala khas kota di negara berkembang. Hal yang berbeda dengan kota di negara maju. Kota di negara berkembang cenderung mengalami apa yang disebut eksodus desa, yaitu orang-orang desa yang pindah ke kota. Sementara itu, kota di negara maju justru cenderung mengalami apa yang disebut eksodus urban, yaitu orang-orang kota pindah ke desa. Studi ini dilakukan dalam dekade 1960-an oleh D. Warriner.

Kedua, Jakarta menjadi bukti penguat studi tersebut. Orang-orang dari berbagai desa di Indonesia datang berbondong-bondong ke kota. Menurut sensus penduduk nasional tahun 1961, para pendatang terbesar berasal dari Jawa Barat. Kemudian diikuti oleh pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara umum, komposisi antara pendatang dengan penduduk asli sudah mencapai 70 : 30. Para pendatang itu menyerbu kota dengan bekal yang berbeda-beda. Ada yang memiliki keahlian relasi, dan sedikit kekayaan sehingga membuka kesempatan hidup layak di kota sesuai harapannya.

Ketiga, Pemerintah daerah di bawah Gubernur Soemarno kesulitan menghadapi populasi penduduk yang meningkat karena tiadanya rencana perkembangan kota yang komprehensif. Penduduk tersebut, terutama para gelandangan dan pekerja sektor informal, memerlukan tempat bermukim yang layak dan terjangkau, Pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang hanya bersifat jangka pendek dan tidak

sistematis dalam pemenuhan kebutuhan papan kaum papa itu. Pemerintah daerah membangun rumah untuk golongan mampu, tetap di sisi lain, mereka justru membongkar rumah-rumah kumuh dan gubuk-gubuk liar yang tumbuh karena ketidakmampuan pemerintah daerah menyediakan perumahan murah. Mereka yang terkena bongkaran atau gusuran dapat menyewa bedeng sebagai gantinya. Tetapi, bedeng-bedeng tersebut tidak diminati oleh pemukim kumuh.

Keempat, Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali. Berbagai kantong permukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Setelah G 30 S, penduduk Jakarta hampir mencapai 4 juta orang. Ali Sadikin, yang menjabat gubernur ibukota setelah 1965, segera melaksanakan panduan-panduan yang ada dalam rencana induk tersebut. Tidak seperti pendahulunya, ia terbantu dengan adanya rencana induk tersebut sehingga penanganan permukiman kumuh di masanya jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kebijakan yang keras, seperti pelarangan dan pembongkaran, ia terapkan untuk para pendatang, gelandangan, dan permukiman kumuh. Tetapi, ia juga berusaha meningkatkan kapasitas ekonomi dan mental warga permukiman kumuh. Ia merencanakan perbaikan kampung yang tidak ditemukan dalam kebijakan terhadap permukiman kumuh di masa sebelumnya. Rencana itu dilakukan secara bertahap dan sistematis : mulai dari sosialisasi, penggalangan dana, hingga eksekusinya. Di tahun 1969, Ali Sadikin berhasil memulai program yang disebut Proyek Mohammad Hoesni Thamrin tersebut. Sebuah usaha

penanggulangan permukiman kumuh yang melibatkan warga permukiman kumuh dan pihak swasta : yang juga melibatkan pembangunan ekonomi dan mental warga permukiman kumuh.

5.2 REKOMENDASI

Menurut saya, pemukiman kumuh ini harus di berantas karena jika tidak seperti itu pemukiman ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Walaupun kerap kali masalah pemukiman ini sering di bahas oleh pemerintahan namun sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat. Maka dari saya berusaha membantu untuk memecahkan masalah pemukiman ini. Beberapa cara untuk mengatasi pemukiman kumuh ini

1. Dengan membangun rumah susun

mungkin dengan adanya rumah susun, yang masih tinggal dipemukiman kumuh ini dapat tinggal di rumah susun ini. Walaupun biayanya tidak begitu murah tetapi fasilitas dan kelayakannya dapat di pertimbangkan. Apalagi dengan adanya rumah susun ini dapat menghemat lahan pemukiman. Selain itu apabila terjadi campur tangan pemerinah, mungkin saya rumah susun ini dapat menjadi lebih murah harga sewanya.Selain itu menurut data yang saya dapatkan, pemerintah mencanangkan anggaran sebesar 220 miliar untuk menyelesaikan masalah pemukiman kumuh ini. Nah mungkin saja dari dana sebesar itu kita dapat membangun rumah susun yang layak bagi masyarat yang tinggal di pemukiman kumuh ini.

2. Memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di pemukiman kumuh.

Tidak lepas dari dampak yang di timbulkan bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh ini. Karena kondisi pemukiman yang jauh dari layak ini menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah mewabahnya penyakit.

Karena kebanyakan pemukiman ini berada di pinggir rel kereta api atau di bawah kolong jembatan. Sehingga tidak terlepas tentang penyakit. Contohnya saja penyakit kulit atau gangguan system pernapasan karena minimnya sanitasi lingkungan tersebut. Maka dari itu pemerintah harus dapat memberikan penyuluhan tentang dampak yang di timbulkan dari pemukiman kumuh ini agar masyarakat bisa sadar dan peka bahayanya tinggal di pemukiman kumuh.

3. Program perbaikan kampung

Apabila cara ke 1 dan ke 2 ini gagal. Maka pemerintah bisa memperbaiki struktur atau fasilitas di desa. Sehingga masyarakat ini dapat tertarik untuk kembali ke kampung halamannya. Salah satu caranya bisa saja dengan memperbaiki fasilitas yang ada di desa seperti yang ada di kota. Atau dapat juga membangun lapangan kerja yang banyak di desa atau memberikan program – program bantuan untuk masyarakat desa seperti yang di rencanakan pemerintah pada program transmigrasi.

Permasalahan pemukiman kumuh juga dapat dijadikan sebagai focus kajian dalam Model pembelajaran terpadu pada IPS. Karena, pemukiman kumuh ditinjau dari beberapa factor sosial yang mempengaruhinya. Diantaranya adalah factor ekonomi, sosial dan budaya juga dapat dari faktor kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan/norma.